

Logika Rakyat Biasa Terkait Reshuffle Kabinet

Beberapa minggu terakhir, berita tentang akan adanya reshuffle kabinet sedemikian semarak. Banyak orang berbicara dan berharap terlalu tinggi tentang hasil reshuffle yang akan diambil oleh presiden. Kebijakan itu kini telah diambil. Menteri baru telah ditunjuk dan demikian pula yang digeser dan bahkan juga beberapa di antaranya yang diberhentikan dan diganti oleh menteri yang baru.

Setelah reshuffle terlaksana, ternyata muncul berbagai pandangan yang berbeda-beda, mulai dari yang sangat optimis hingga mereka yang tidak terlalu percaya bahwa kebijakan tersebut akan membawa perbaikan pada kehidupan bangsa ini. Mereka yang berpihak pada presiden, reshuffle itu dipandang menjadi keputusan yang paling tepat. Agak berbeda, adalah dari kalangan partai politik. Tidak semua merasa puas, lantaran jatah kursi yang diterima tidak bertambah dan bahkan berkurang. Sedangkan sementara rakyat yang mengerti politik, ada yang merasa kecewa dengan keputusan reshuffle itu.

Perbedaan itu terjadi oleh karena masing-masing memiliki logika yang berbeda-beda. Presiden sebagai kepala negara yang bertanggung jawab secara luas dan menyeluruh, maka keputusan itu akan diambil atas dasar pertimbangan dari berbagai sudut pandang yang luas, baik terkait dengan pertumbuhan ekonomi global, dukungan parlemen, maupun lainnya. Partai politik memiliki kepentingan sendiri untuk partainya. Demikian pula rakyat, mereka merasa harus mendapatkan keuntungan secara nyata dari reshuffle itu.

Kepentingan dan logika yang berbeda-beda itu menjadikan kebijakan reshuffle terasa tidak berhasil memuaskan terhadap semua pihak. Rakyat misalnya, memiliki logika bahwa bangsa ini harus segera mencapai cita-citanya, yaitu adil dan makmur, bebas dari korupsi, sebagai buah dari adanya pemimpin yang amanah dan jujur. Sementara itu, rakyat yang mengerti politik, memahami bahwa cita-cita tersebut tidak akan tercapai manakala keputusan politik yang diambil oleh presiden seperti yang tergambar itu.

Selama ini sudah terlanjur ada kesan yang mendalam bahwa penyimpangan keuangan negara yang disebut dengan korupsi, ditengarai oleh karena dominasi partai politik yang berlebihan. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota parlemen dan juga pejabat politik seperti bupati, walikota, gubernur dan lain-lain di berbagai tempat, adalah sebagai akibat dari dominasi partai politik itu. Transaksi-transaksi politik yang terjadi selama ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau korupsi di mana-mana.

Logika seperti itu menumbuhkan keyakinan bahwa, selama kekuatan partai politik dijadikan pertimbangan utama dalam menyusun anggota kabinet, hingga muncul istilah koalisi, atau berbagi-bagi jatah kursi anggota kabinet, maka memberi kesan bahwa korupsi akan tetap merajalela. Pendekatan politik seperti itu, menjadikan apapun kebijakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi, tidak akan membawa hasil. Pendekatan itu mirip dengan seseorang yang membersihkan air di lantai tetapi genting bocor yang mengakibatkan genangan air tersebut tidak diperbaiki terlebih dahulu.

Keinginan rakyat sebenarnya sederhana saja. Yaitu ingin melihat agar para pembantu presiden yang disebut dengan istilah menteri itu tidak diwarnai oleh orang-orang dari partai politik. Mereka sebenarnya mengerti bahwa penunjukan anggota kabinet adalah merupakan hak prerogatif presiden. Karena sistem yang dianut di negeri ini adalah sistem presidentil. Namun sementara rakyat yang mengerti politik berharap agar presiden tidak perlu membangun koalisi hingga kabinetnya menyerupai parlementer. Pilihan yang kurang jelas itu dinilai merugikan rakyat, karena rawan terjadinya penyimpangan, seperti korupsi yang sangat dibenci itu.

Umpama keinginan dan logika sementara rakyat itu terpenuhi, kiranya suasana berisik pasca reshuffle tidak terlalu terdengar seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Namun keputusan itu telah diambil oleh yang berwenang, yaitu presiden. Oleh karena itu, sikap bijak yang harus dikembangkan adalah bagaimana agar bangsa ini minimal masih aman, tanpa gangguan apapun. Jangan sampai, rakyat ini menjadi korban idealisme, hingga menderita yang berlipat-lipat. Kesalahan dalam mengambil sikap dan langkah, maka rakyat pula yang akan menanggung resikonya. *Wallahu a'lam.*